

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan. (Mohamad Mahsun, 2006: 4)

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga. (Mohamad Mahsun, 2012: 141)

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya et al., 2013). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat

dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab

alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kerjanya harus ditingkatkan.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya. harus diakui selama ini aparat pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparat pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Kab. Bandung barat.

Fenomena terkait kinerja pemerintah daerah Kab. Bandung barat yang penulis kutip dari Tribun Jabar yaitu pemerintah Kab. Bandung barat mendapatkan nilai CC dari KEMENPAN. Kab. Bandung barat mendapat penilaian CC, untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemenpan RB). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintah KBB

atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal. Dalam penilaian 5 komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni perencanaan kerja yang bobotnya 35, pengukuran kerja 20 bobot, pelaporan kerja 15 bobot, evaluasi kerja hanya 10 bobot dan pencapaian kinerja yang hanya 20 bobot. Namun dengan demikian KBB hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65. Dari skor yang diraih yang hanya berbobot 50-65, komponen yang paling mempengaruhi penilaian terletak pada perencanaan kerja yang selalu copy paste setiap tahunnya dan kurang selaras dengan Visi Misi Bupati. Kemudian kekurangan Pemkab KBB terletak pada ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.

(<http://jabar.tribunnews.com/2017/01/26/kbb-dapat-nilai-cc-kinerja-pemerintah-dinilai-mengecewakan>)

Menurut kebijakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menyatakan kategori LAKIP sebagai berikut:

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	>0-30

Tabel 1.1 Kategori penilaian LAKIP

Fenomena lain terkait kinerja pemerintah yang penulis kutip dari pikiran rakyat yaitu menginjak usia 11 tahun, Bandung barat masih jauh dari cita-cita

pemekaran. Menginjak usia yang ke-11 pada 19 Juni 2018, Kabupaten Bandung Barat atau KBB dinilai belum berhasil mewujudkan cita-cita ketika dulu dimekarkan dari Kabupaten Bandung. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Bandung Barat justru menjadi daerah termiskin keenam di Jawa Barat. Tujuan utama pemekaran sehingga lahirnya KBB adalah untuk percepatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selama 11 tahun terbentuknya KBB, tujuan itu masih jauh dari harapan, sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa tujuan dari pencapaian kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan. Di antaranya, bisa dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Bandung Barat. Ironisnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga jauh lebih rendah dari rata-rata IPM di Jabar, yang berada di angka 70,69. Sementara IPM Bandung Barat pada 2017 ialah 66,63. Ironis lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar yang juga masih jauh dari kata memuaskan. Infrastruktur dasar itu, contohnya, ialah-jalan kabupaten yang panjangnya kurang lebih 518 kilometer. Sekitar 40 persen atau sekitar 207 kilometer masih dalam kondisi rusak ringan sampai berat. Di samping itu juga masyarakat di Bandung Barat juga masih relatif kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran terbuka di KBB juga masih cukup tinggi.

(<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/19/menginjak-usia-11-tahun-bandung-barat-masih-jauh-dari-cita-cita-pemekaran>)

Fenomena lainnya terkait pengelolaan keuangan yang penulis kutip dari detik *news* yaitu BPK Perwakilan Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017

kepada 27 kabupaten kota. Hasilnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang gagal raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). penyerahan LHP LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota. TA 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Persoalan yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ditemukan persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian.

<https://news.detik.com/jawabarat/4045429/kota-bandung-bandung-barat-dan-subang-gagal-raih-opini-wtp>

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kab. Bandung Barat dinilai kurang maksimal sehingga tujuan dari pemerintah Kab. Bandung barat belum tercapai beberapa contohnya kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan, tingginya angka kemiskinan, masih banyaknya perencanaan yang belum selesai, ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja, dan ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran serta ditemukan persoalan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan oleh karena itu berdampak pada penilaian dari Kemenpan-RB yang mendapatkan nilai CC dan mendapatkan opini WDP untuk laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk pemerintah Kab. Bandung barat.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya

keseerasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2014).

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik sebagai perwujudan *good governance* khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, tidak terlepas dari sistem pengawasan yang baik., bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat sebagai Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) dan mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Wiguna et al., (2015).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri dalam Negeri No 51 tahun 2010).

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012)

Akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015), Adiwirya dan Sudana (2015).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan Wiguna et al., (2015). Faktor yang kedua adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan penelitian Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012). Faktor yang ketiga adalah transparansi pengelolaan keuangan Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015); Adiwirya dan Sudana (2015).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Nopriansyah putra, Erlina dan Tapi anda sari (2016) mengenai “Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan pengawasan sebagai variable moderating pada Provinsi Sumatera Utara” perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada variabel pengawasan yang merupakan variabel moderating, indikator, dimensi dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya

melakukan penelitian di pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedangkan penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kab. Bandung Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat (Survey pada Dinas di Pemerintah Kab. Bandung Barat).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan keuangan di pemerintah Kab. Bandung barat.
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintah Kab. Bandung barat.
3. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah Kab. Bandung barat.
4. Bagaimana kinerja pemerintah daerah di Kab. Bandung barat
5. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial
6. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah secara simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan keuangan daerah di pemerintah Kab. Bandung barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintah Kab. Bandung barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kab. Bandung barat
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah daerah Kab.bandung barat
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi khususnya pada materi Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

1.4.2 Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkembangan sistem informasi akuntansi baik secara teoritis maupun secara praktis. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan di lapangan.

b. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintah Kab. Bandung Barat Jl. Raya Padalarang - Cisarua Km. 2 Desa. Mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat 40552 Jawa Barat – Indonesia. Waktu penelitian dimulai pada mulai Mei sampai dengan selesai.